

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Energi merupakan kebutuhan pokok yang sangat vital untuk menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah. Program konversi minyak tanah ke gas yang dimulai pemerintah sejak tahun 2007 telah membuat ketergantungan masyarakat terhadap *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) ukuran 3 kg menjadi sangat tinggi. Niat awal program ini adalah mulia, yaitu memberikan akses energi yang lebih bersih dan terjangkau bagi rakyat kecil serta mengefisiensikan anggaran subsidi negara. Seiring berjalannya waktu, beban anggaran negara untuk membiayai subsidi ini terus membengkak karena jumlah pengguna yang semakin tidak terkendali setiap tahunnya. Situasi ini mendorong perlunya sebuah regulasi baru untuk memastikan agar bantuan subsidi energi benar-benar dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berhak menerimanya (Winarno, 2016).

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merespons tantangan tersebut dengan menerbitkan kebijakan baru pada awal tahun 2025. Kebijakan ini tertuang secara resmi dalam Surat Edaran Dirjen Migas No. B-570/MG.05/DJM/2025 yang mengatur pembatasan distribusi LPG 3 kg di tingkat sub-penyalar. Aturan ini secara spesifik melarang penjualan gas bersubsidi di tingkat pengecer atau warung kecil dan memusatkan transaksi hanya di pangkalan resmi. Langkah ini diambil dengan maksud untuk memotong rantai distribusi yang dianggap terlalu panjang dan sering memicu kenaikan harga di luar kewajaran. Pemerintah berharap penertiban ini dapat menstabilkan harga eceran

serta mencegah praktik penimbunan yang merugikan konsumen (Kementerian ESDM, 2023).

Tujuan utama kebijakan ini memiliki landasan rasional yang kuat jika ditinjau dari perspektif perencanaan teknokratis. Sistem distribusi tertutup yang mewajibkan penggunaan data KTP atau NIK bertujuan agar setiap tabung gas yang keluar dapat terlacak dengan jelas penerimanya. Pemusatan penjualan di pangkalan resmi diharapkan mampu meningkatkan pengawasan stok barang dan meminimalisir kebocoran subsidi ke golongan masyarakat mampu. Transformasi tata kelola niaga ini pada dasarnya dirancang untuk menciptakan efisiensi anggaran negara dan keadilan distributif dalam jangka panjang. Kendati demikian, sebuah kebijakan yang terlihat ideal dalam konsep perencanaan sering kali menghadapi tantangan kompleks ketika diimplementasikan pada realitas sosial yang beragam (Nugroho, 2018).

Realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara harapan aturan kebijakan dibentuk (*Das Sollen*) dengan kenyataan empiris yang terjadi (*Das Sein*). Aturan ini secara normatif menuntut ketertiban administrasi, namun infrastruktur pangkalan resmi ternyata belum siap melayani lonjakan permintaan yang tiba-tiba berpindah dari warung. Masyarakat di berbagai wilayah mengeluhkan jarak pangkalan yang jauh dan jam operasional yang terbatas dibandingkan dengan warung eceran yang lebih fleksibel. Ketidaksiapan infrastruktur pendukung ini menyebabkan akses warga terhadap kebutuhan dasar menjadi terhambat secara signifikan. Hal ini mencerminkan bahwa pembuat

kebijakan kurang memperhitungkan aspek sosiologis dan kesiapan teknis di tingkat akar rumput (Kelsen, 2011).

Masalah teknis dalam implementasi tersebut kemudian memicu kekacauan distribusi yang meresahkan di berbagai daerah. Warga yang panik karena stok di warung langganan mereka kosong berbondong-bondong menyerbu pangkalan resmi yang jumlahnya terbatas. Antrean panjang warga yang membawa tabung gas menjadi pemandangan umum yang memprihatinkan dan memicu kelelahan fisik serta emosional. Kelangkaan pasokan di pasar akhirnya membuat hukum ekonomi berlaku, di mana harga gas di pasar gelap melambung tinggi melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Situasi chaos ini membuktikan bahwa kebijakan tersebut gagal memberikan jaminan ketersediaan energi yang justru menjadi mandat utamanya (BBC News Indonesia, 2025).

Dampak ekonomi dari kekacauan distribusi ini langsung memukul daya beli masyarakat dan kelangsungan usaha kecil. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seperti pedagang makanan keliling sangat terpukul karena biaya produksi mereka meningkat drastis akibat harga gas yang mahal. Banyak pedagang kecil terpaksa berhenti berjualan sementara waktu karena tidak sanggup mendapatkan bahan bakar atau kehabisan waktu untuk mengantre. Gangguan pada rantai pasok energi ini secara tidak langsung telah mematikan aktivitas ekonomi rakyat yang seharusnya dilindungi oleh negara. Kebijakan ini dinilai kontradiktif karena alih-alih menyejahterakan, justru menambah beban hidup warga miskin (Kumparan, 2025).



Gambar 1. 1 Kematian Warga Akibat Antrean Panjang
Sumber: Kompas.com

Insiden kemanusiaan yang sangat tragis menimpa Seorang ibu lanjut usia bernama Ibu Yonih (62 tahun) dilaporkan meninggal dunia akibat kelelahan ekstrem saat mengantre untuk mendapatkan gas 3 kg di Tangerang Selatan. Peristiwa ini kejadian pemicu utama yang mengalihkan isu ini dari sekadar masalah ekonomi menjadi krisis kemanusiaan. Kematian warga negara dalam upaya memenuhi kebutuhan dasarnya menjadi tamparan keras bagi legitimasi moral kebijakan yang sedang berjalan. Tragedi ini seketika memicu gelombang empati dan kemarahan publik yang menuntut pertanggungjawaban pemerintah (Narasi TV, 2025).

Ketegangan hubungan antara negara dan masyarakat semakin meruncing akibat respons kebijakan yang dianggap lambat. Publik menilai pemerintah tidak

peka terhadap penderitaan rakyat dan terlalu kaku mempertahankan prosedur birokrasi di tengah situasi darurat. Jurang pemisah antara konsep ideal pemerintah tentang subsidi tepat sasaran dan realitas penderitaan warga di lapangan (*gap Das Sollen dan Das Sein*) menjadi sumber konflik sosial. Rasa tidak percaya terhadap kompetensi pemerintah dalam mengurus hajat hidup orang banyak mulai meluas ke berbagai lapisan masyarakat. Kondisi ini menciptakan instabilitas sosial yang berpotensi menggerus legitimasi pemerintahan yang baru terbentuk (Tempo, 2025).

Masyarakat kini beralih ke media sosial sebagai saluran utama untuk menyuarakan protes dan keluhan mereka secara terbuka. Platform digital seperti X (sebelumnya Twitter) menjadi ruang publik alternatif yang efektif untuk membagikan bukti-bukti kegagalan kebijakan secara *real-time*. Foto-foto antrean panjang, video kericuhan di pangkalan, dan keluhan harga mahal menjadi konten viral yang menyebar dengan sangat cepat. Media sosial memberikan kekuatan baru bagi warga biasa untuk melakukan fungsi pengawasan sosial yang selama ini sulit dilakukan melalui saluran formal. Aktivitas di dunia maya kini bergeser dari tempat ajang unjuk diri menjadi wadah pembentkan opini publik secara nasional yang solid menentang kebijakan tersebut (Utomo & Irwansyah, 2023).



**Gambar 1. 2 #IndonesiaGelap Top 1 Trending di X
Sumber: x.com/@NarasiNewsroom. 2025**

Gerakan protes digital ini kemudian terkonsolidasi menjadi sebuah aktivisme online yang terstruktur dan masif. Tagar-tagar perlawanan seperti #IndonesiaGelap dan #PENTOL mendominasi topik pembicaraan (trending topic) dan menjadi simbol persatuan netizen. Gerakan ini tidak hanya berhenti pada keluhan, tetapi juga memuat tuntutan politis agar kebijakan segera dibatalkan demi keselamatan rakyat. Fenomena "No Viral No Justice" terlihat nyata, di mana atensi publik yang besar di media sosial digunakan sebagai alat penekan kebijakan. Solidaritas digital ini membuktikan bahwa suara kolektif di internet memiliki daya tawar politik yang diperhitungkan (Harniati, 2024).

Tekanan masif dari aktivisme media sosial ini pada akhirnya berhasil memaksa pemerintah melakukan perubahan agenda (*agenda setting*) secara mendadak. Pemerintah yang semula bersikukuh melanjutkan kebijakan, akhirnya memutuskan untuk membatalkan aturan pembatasan tersebut hanya empat hari setelah pelaksanaannya. Keputusan pembatalan ini terbuka paksa akibat desakan opini publik yang tidak terbendung di ruang digital. Kasus ini menjadi bukti empiris

bahwa aktivisme media sosial mampu mengintervensi proses kebijakan publik dan memaksa negara mengubah keputusannya (Kingdon, 2011).

Pemerintah di era digital perlu mengadopsi model tata kelola yang lebih adaptif dan berbasis data untuk menghadapi tantangan serupa di masa depan. Metode analitis seperti *Social Network Analysis* (SNA) dan *IndoBert* dapat dimanfaatkan untuk memetakan sentimen dan persepsi publik secara dinamis. Penggunaan opini sekunder (*secondary opinion*) dari *platform* media online memungkinkan identifikasi isu secara dini dan formulasi respons kebijakan yang lebih terkalibrasi. Kegagalan untuk mengintegrasikan suara publik digital dalam siklus kebijakan bukan lagi sekadar kelemahan prosedural, melainkan sebuah kerentanan strategis dalam sistem pemerintahan modern. Dengan melihat fakta-fakta di atas penelitian perlu dilakukan, sehingga pernyataan penelitian harus dijawab

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Media sosial di era Industri 4.0 telah menjadi saluran baru partisipasi publik yang mempengaruhi kebijakan publik.
2. Kebijakan penyesuaian ketentuan pendistribusian LPG tabung 3 kg di sub-penyalar pada 1 Februari dicabut setelah muncul gelombang protes di media sosial.

3. Banyak akun media sosial, tokoh publik, hingga tagar viral seperti *#ViralForJustice* mengkonsolidasikan opini masyarakat.
4. Respons cepat pemerintah menunjukkan adanya korelasi langsung antara tekanan publik digital dengan perubahan kebijakan penyesuaian ketentuan pendistribusian LPG tabung 3 kg di sub-penyialur.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana respon masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan Penyesuaian Ketentuan pendistribusian LPG tabung 3 kg di sub-penyialur Februari 2025?
2. Apa faktor penyebab masyarakat menolak Penyesuaian Ketentuan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg di Sub-Penyialur Februari 2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Bagaimana respon masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan Penyesuaian Ketentuan pendistribusian LPG tabung 3 kg di sub-penyialur Februari 2025.
2. Menganalisis faktor persepsi dan respons pengambil kebijakan terhadap tekanan publik digital dalam konteks kebijakan gas LPG 3 kg.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

1. Memberikan sumbangan teoritis bagi pengembangan kajian partisipasi publik digital dalam ilmu administrasi publik.
2. Memperkuat literatur tentang hubungan media sosial dan kebijakan publik dengan pendekatan studi kasus Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Memberi wawasan kepada pemerintah tentang pentingnya memantau dinamika opini publik di media sosial sebagai *early warning system* kebijakan.
2. Menjadi bahan evaluasi internal bagi pembuat kebijakan untuk membangun pola komunikasi dan respons kebijakan yang adaptif dan *agile*.

1.4.3 Kegunaan Sosial

1. Mendorong masyarakat agar sadar dan aktif dalam menyuarakan pendapat secara kolektif dan bertanggung jawab di media sosial.
2. Menumbuhkan kesadaran bahwa media sosial dapat menjadi alat kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis dan Judul	Teori	Hasil Penelitian
1.	Utomo, B. S., & Irwansyah, I. (2023). Peran Media Sosial dalam Gerakan Menolak Penundaan Pemilu di Indonesia	Tindakan Konektif (Connective Action). Teori ini adalah evolusi dari teori gerakan sosial kolektif yang lebih tradisional. Jika tindakan kolektif membutuhkan identitas kelompok yang kuat dan koordinasi dari organisasi formal, maka tindakan konektif difasilitasi oleh teknologi digital. Media sosial memungkinkan partisipasi massal yang lebih terdesentralisasi dan berpusat pada individu, di mana orang dapat bergabung dalam sebuah gerakan dengan cara membagikan konten atau tagar tanpa harus menjadi anggota organisasi resmi.	Media sosial menjadi kanal utama dalam menggerakkan opini dan penolakan terhadap kebijakan yang dinilai tidak demokratis.
2.	Riendani, C. R., et al. (2024). Pengaruh Algoritma Media Sosial Terhadap Selektivitas Konsumsi Berita Politik Pada Generasi Z	Teori Paparan Selektif (Selective Exposure Theory) menyatakan bahwa individu memiliki kecenderungan untuk mencari dan mengonsumsi informasi yang mengkonfirmasi keyakinan dan sikap mereka yang sudah ada, sambil menghindari informasi yang menantanginya. Penelitian ini mengkaji bagaimana algoritma media sosial memperkuat tendensi ini dengan secara otomatis menyajikan konten yang disukai pengguna, yang berpotensi menciptakan "gelembung filter" (filter bubble) dan membatasi paparan mereka terhadap sudut pandang yang beragam.	Gen Z cenderung hanya menerima informasi sesuai preferensi politiknya, mempengaruhi persepsi dan reaksi terhadap kebijakan publik.
3.	Anwar, M. (2024). Pengaruh Penggunaan Media Sosial X (Twitter) Terhadap Partisipasi Politik	teori Partisipasi Politik. Teori ini membedakan berbagai bentuk keterlibatan warga negara dalam proses politik. Jurnal ini secara spesifik menguji bagaimana penggunaan media sosial seperti X (Twitter) tidak hanya mendorong partisipasi politik online (seperti me-retweet, menyukai, atau berkomentar), tetapi juga apakah aktivitas digital tersebut dapat	Twitter terbukti meningkatkan kesadaran politik dan keikutsertaan publik dalam isu-isu kebijakan nasional.

No	Nama Penulis dan Judul	Teori	Hasil Penelitian
		diterjemahkan menjadi partisipasi politik offline yang lebih konvensional (seperti datang ke pemilu, bergabung dalam unjuk rasa, atau menjadi relawan).	
4.	Kim, R., Veselovsky, V., & Anderson, A. (2023). <i>Capturing Dynamics in Online Public Discourse</i>	Teori Ruang Publik (Public Sphere Theory) yang digagas oleh Jürgen Habermas. Teori ini mengidealkan sebuah ruang di mana warga negara dapat berkumpul dan berdiskusi secara bebas dan rasional mengenai isu-isu publik. Penelitian ini menggunakan metode komputasional untuk menganalisis apakah ruang diskursus online (seperti forum atau media sosial) benar-benar berfungsi sebagai ruang publik yang sehat atau justru terfragmentasi dan dipenuhi oleh disinformasi dan polarisasi.	Media sosial mempercepat pembentukan opini kolektif yang bisa mempengaruhi narasi kebijakan.
5.	Rashid, R., et al. (2024). <i>Quantifying Influencer Impact on Affective Polarization</i>	Teori polarisasi Afektif Seperti yang dijelaskan di poin pertama, ini bukan tentang seberapa jauh perbedaan ideologi, melainkan tentang meningkatnya rasa permusuhan dan sentimen negatif terhadap kelompok politik lawan. Jurnal Rashid et al. secara kuantitatif mengukur bagaimana influencer di media sosial dapat memperburuk atau meredakan sentimen ini.	<i>Influencer</i> memperkuat polarisasi dan tekanan terhadap kebijakan yang dianggap kontroversial.
6.	Jiang, J., Ren, X., & Ferrara, E. (2021). <i>Social Media Polarization and Echo Chambers</i>	Teori Polarisasi, <i>Echo Chamber Social Media Polarization and Echo Chambers</i> Jurnal ini menggunakan dua teori yang saling terkait: Polarisasi dan Ruang Gema (Echo Chambers). Ruang Gema Merujuk pada lingkungan informasi di mana keyakinan seseorang diperkuat melalui komunikasi dan pengulangan di dalam sebuah jaringan yang tertutup. Di dalam ruang gema, pandangan yang berlawanan disensor atau didiskreditkan. Teori ini menyatakan bahwa media sosial memfasilitasi pembentukan ruang gema ini, yang pada gilirannya dapat meningkatkan polarisasi.	Opini ekstrem terbentuk dan memperkuat tekanan kepada pemerintah untuk mengubah kebijakan.

No	Nama Penulis dan Judul	Teori	Hasil Penelitian
7.	Flamino, J., et al. (2021). <i>Shifting Polarization and Twitter News Influencers</i>	Polarisasi politik tidak lagi hanya tentang ketidaksepakatan pada isu kebijakan, melainkan telah menjadi sebuah permusuhan yang didasari oleh identitas partisan; ditandai oleh ketidakpercayaan, ketidaksukaan, dan sentimen negatif terhadap pendukung partai lawan (Iyengar, S., & Westwood, S. J.).	Influencer membentuk arus besar opini dan mempengaruhi keputusan politik yang berdampak kebijakan.
8.	Marques, F. P. J., & Miola, E. (2021). <i>Key Concepts, Dilemmas, and Trends in Political Communication</i>	Teori mediatisasi politik dan masyarakat semakin tunduk pada atau bergantung pada media dan logikanya. di mana media tidak hanya menjadi perantara, tetapi juga membentuk interaksi sosial dan politik itu sendiri (Hjarvard, S., & Esser, F.).	Komunikasi digital menjadi alat dominan dalam membentuk arah kebijakan publik.
9.	Mustapha, L. K., & Omar, B. (2020). <i>Do Social Media Matter?</i>	Teori Penggunaan dan Gratifikasi (Uses and Gratifications Theory). Teori ini berargumen bahwa individu bukanlah konsumen media yang pasif. Sebaliknya, mereka secara aktif memilih dan menggunakan media tertentu untuk memenuhi kebutuhan psikologis dan sosial mereka, seperti mencari informasi, hiburan, atau interaksi sosial. Dalam konteks ini, penelitian melihat bagaimana penggunaan media sosial untuk memenuhi kebutuhan politik (misalnya, mencari informasi tentang pemilu) dapat memengaruhi sikap dan perilaku politik mereka.	Media sosial meningkatkan keterlibatan dan tekanan pemuda dalam proses perubahan kebijakan.
10.	Chu, D. S. C. (2018). <i>Media Use and Protest Mobilization: A Case Study of Umbrella Movement</i>	Teori Mobilisasi Sumber Daya (Resource Mobilization) Munculnya sebuah gerakan sosial tidak bergantung pada ada atau tidaknya penderitaan, melainkan pada kemampuan para pemimpin gerakan untuk mengumpulkan dan mengelola sumber daya, baik itu uang, tenaga kerja, maupun saluran komunikasi	Media sosial sangat efektif dalam membentuk perlawanan terhadap kebijakan yang tidak populer.
11.	Zhang, W., Zhang, M., Yuan, L., & Fan, F. (2021). <i>Social network analysis and</i>	Teori kebijakan yang dimaksud tidak diciptakan dan diimplementasikan secara sepihak oleh pemerintah, melainkan merupakan hasil dari interaksi, negosiasi, dan pertukaran sumber daya antara	penelitian menunjukkan hubungan sebab-akibat (kausal) yang jelas antara struktur jaringan

No	Nama Penulis dan Judul	Teori	Hasil Penelitian
	<i>public policy: what's new? Journal of Asian Public Policy,</i>	berbagai organisasi publik dan swasta. Analisis dalam teori ini berfokus pada pemetaan aktor (nodes) dan hubungan (ties) di antara mereka untuk mengidentifikasi struktur kekuasaan, aliran informasi, dan posisi strategis para aktor melalui ukuran seperti sentralitas (centrality).	tertentu dengan hasil kebijakan yang spesifik.
12.	Novotný, V., Satoh, K., & Nagel, M. (2020). <i>Refining the Multiple Streams Framework's Integration Concept: Renewable Energy Policy and Ecological Modernization in Germany and Japan in Comparative Perspective. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice.</i>	John W. Kingdon, dalam buku klasiknya " <i>Agendas, Alternatives, and Public Policies</i> ", menjadi penggagas utama teori ini. Ia menjelaskan bahwa agar sebuah isu menjadi agenda, diperlukan lebih dari sekadar masalah yang diakui. Menurutnya, perlu tiga aliran yang bertemu di satu hulu peristiwa itu disebut sebagai <i>policy window</i> , masing-masing aliran itu adalah <i>policy stream</i> , <i>problem</i> , and <i>political stream</i> .	Perbedaan dalam struktur jaringan ini berkorelasi dengan hasil kebijakan di kedua negara. Tingkat integrasi yang lebih tinggi di Jerman sejalan dengan penerimaan modernisasi ekologis yang lebih luas dan kebijakan perubahan iklim yang lebih aktif dibandingkan dengan Jepang.
13.	Manit, J., Kolpakov, A., & Eubank, W. (2020). <i>Analyzing Social Policy from a Network Perspective. Advances in Social Work.</i>	Teori jaringan antar-organisasi adalah yang mengatur dirinya sendiri.. yang ditandai oleh saling ketergantungan, pertukaran sumber daya, aturan main, dan otonomi signifikan dari negara (Rhodes, R.A.W)	Temuan menunjukkan implementasi kebijakan yang sukses, seorang praktisi perlu secara strategis melibatkan aktor-aktor sentral yang dipercaya untuk promosikan tujuan jaringan

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber (2025)

Media sosial telah merevolusi partisipasi publik, berubah dari sekadar alat komunikasi menjadi arena strategis untuk menekan pembuat kebijakan. Hal ini

terlihat pada gerakan penolakan penundaan Pemilu 2024, di mana media sosial menggantikan fungsi ruang publik fisik (Utomo & Irwansyah, 2023). Penggunaan media sosial yang intensif juga terbukti berkorelasi positif dengan peningkatan partisipasi politik (Anwar et al., 2024). Namun, perlu diwaspadai bahwa algoritma digital dapat menciptakan bias informasi dan ruang gema (*echo chamber*) yang menyempitkan perspektif publik (Jiang et al., 2021; Riendani et al., 2024).

Selain itu, figur digital atau *influencer* memegang peran vital dalam menggerakkan emosi kolektif dan memengaruhi arah kebijakan (Flamino et al., 2021; Rashid et al., 2024). Fenomena ini terkonfirmasi secara global, mulai dari pembentukan narasi proaktif terkait diskusi UBI di Reddit (Kim et al., 2023), peningkatan partisipasi politik pemuda di Nigeria (Mustapha & Omar, 2020), hingga legitimasi tekanan digital dalam protes di Hong Kong (Chu, 2018).

Berpijak pada literatur terdahulu sebagai peta jalan riset (Neuman, 2014), penelitian ini mengidentifikasi celah krusial. Meskipun media sosial terbukti mampu mengintervensi agenda negara, studi yang secara spesifik meneliti dampak tekanan digital terhadap perubahan kebijakan formal menggunakan kacamata *Multiple Stream Framework* (MSF) masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan literatur tersebut di tengah meningkatnya kekuatan viralitas digital.

1.5.2 Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan fondasi utama fungsi negara yang melibatkan seluruh kegiatan aparatur dalam mencapai tujuan kenegaraan (Atmosudirdjo, 2016; Siagian, 2017). Proses ini tidak hanya mencakup manajemen

sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara akuntabel (Thoha, 2008), tetapi juga menekankan kerja sama kolaboratif dalam memenuhi kebutuhan publik (Pasolong, 2010).

Dalam konteks demokrasi Indonesia, keberhasilan administrasi publik tidak sekadar diukur dari *output* administratif, melainkan dari kemampuannya mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa sistem yang responsif dan inklusif, kebijakan negara tidak akan memberikan manfaat nyata. Kini, pemanfaatan teknologi menjadi peluang krusial untuk menciptakan sistem administrasi yang semakin efisien dan efektif sesuai perkembangan zaman.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Ilmu administrasi publik merupakan hasil evolusi panjang dari filsafat politik serta dinamika sosial-ekonomi. Perjalanannya ditandai oleh pergeseran cara pandang terhadap peran negara, birokrasi, dan relasi antara politik dengan administrasi. Perkembangan historis ini dipetakan oleh Henry ke dalam lima paradigma utama yang menjadi fondasi disiplin ilmu tersebut (Pasolong, 2019).

Paradigma I: Dikotomi Politik dan Administrasi (1987–1926)

Paradigma *Old Public Administration* berakar pada pemikiran Woodrow Wilson yang menekankan pemisahan tegas antara politik dan administrasi. Dalam esainya, *The Study of Administration*, Wilson berargumen bahwa administrasi harus berjalan secara ilmiah dan efisien di luar ranah politik (Wilson, 1887). Konsep yang dikenal sebagai dikotomi politik-administrasi ini menempatkan birokrasi sebagai pelaksana teknis yang netral, sebuah prinsip yang menjadi fondasi awal bagi perkembangan studi administrasi publik modern.

Paradigma II: Prinsip-Prinsip Administrasi (1927–1937)

Periode ini berfokus pada efisiensi manajerial melalui penerapan prinsip administrasi yang dianggap universal, seperti konsep POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*) yang dipopulerkan oleh Gulick dan Urwick. Pada masa ini, administrasi dipandang sebagai disiplin teknis yang dapat diterapkan di berbagai konteks. Namun, pendekatan yang terlalu mekanistik ini menuai kritik karena dianggap mengabaikan dinamika sosial-politik. Herbert Simon (1946) secara tajam menolak validitas ilmiah prinsip-prinsip tersebut karena dinilai inkonsisten dan hanya bersifat normatif.

Paradigma III: Administrasi sebagai Ilmu Politik (1950–1970)

Gelombang pemikiran baru menolak pemisahan kaku antara politik dan administrasi, serta mengembalikan disiplin ini ke dalam ranah ilmu politik. Laporan *American Political Science Association* pada tahun 1962 menegaskan bahwa setiap tindakan administratif sarat akan nilai dan kekuasaan, sehingga administrasi publik pada hakikatnya adalah instrumen negara. Dalam konteks ini, efisiensi saja tidak lagi memadai tanpa adanya dimensi keadilan sosial dan akuntabilitas (Stillman, 2000).

Paradigma IV: Administrasi sebagai Ilmu Administrasi (1956–1970)

Seiring berkembangnya metode ilmiah dalam ilmu sosial, administrasi publik mengukuhkan diri sebagai disiplin otonom dengan pendekatan riset yang lebih ketat. Fokus kajian beralih pada penguatan metodologi dan sistematika berpikir yang dapat diuji secara empiris, melampaui sekadar efisiensi teknokratis. Dengan

mengadopsi teori sistem dan perilaku organisasi, pandangan ini sejalan dengan prinsip *logical empiricism* dari tokoh seperti Fritz Morstein Marx dan Dwight Waldo. Dalam perspektif ini, administrasi dipahami sebagai sistem hidup yang harus dianalisis melalui realitas empiris dan refleksi teoretis (Rosenbloom, 2008).

Paradigma V: Administrasi sebagai Administrasi (1970–1990)

Administrasi publik pada era ini menegaskan identitas otonomnya, tidak lagi bergantung sepenuhnya pada ilmu politik maupun manajemen bisnis. Fokus disiplin ilmu ini mendalam pada kajian organisasi, perilaku birokrasi, serta mekanisme pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Dinamika tersebut membuka jalan bagi perspektif baru yang lebih adaptif, mulai dari *New Public Administration*, *New Public Management*, hingga pendekatan posmodern. Kajian administrasi publik kini melampaui sekadar tata kelola teknis, karena turut mencakup dimensi etika, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat (Denhardt & Denhardt, 2015; Osborne & Gaebler, 1992)

Paradigma VI: *Governance* (1990-sekarang)

Konsep *good governance* ditafsirkan melalui berbagai dimensi strategis oleh para ahli di Indonesia. Tjokroamidjojo (1995) mendefinisikannya sebagai bentuk manajemen pembangunan di mana pemerintah pusat berperan sentral sebagai agen perubahan. Sementara itu, Thoha (2008) menekankan aspek transparansi dan kepastian hukum, dengan menyatakan bahwa tata pemerintahan harus terbuka, dapat diprediksi, dan bebas dari kecurigaan. Pandangan ini diperkuat oleh Tjokrowinoto (1996) yang menuntut transformasi budaya birokrasi, yaitu pergeseran dari orientasi aturan yang kaku menuju model pelayanan yang

partisipatif. Ketiga perspektif tersebut menegaskan urgensi perubahan paradigma administrasi menuju tata kelola yang lebih kolaboratif.

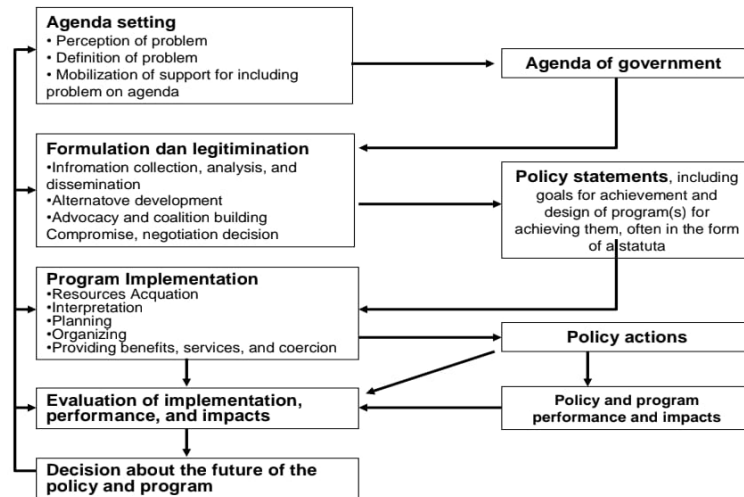
Penelitian ini berlabuh pada paradigma kelima administrasi publik yang menempatkan kebijakan publik sebagai unit analisis utama. Pendekatan ini dinilai paling relevan untuk membedah fenomena penolakan kebijakan distribusi LPG 3 kg dibandingkan opsi lainnya (Henry, 2013).

Paradigma klasik (I dan II) tidak digunakan karena sifatnya yang terlalu mekanistik dan mengabaikan realitas politik. Sementara itu, paradigma III dan IV lebih banyak berkuat pada perdebatan identitas disiplin ilmu daripada praktik kebijakan. Adapun paradigma *governance* atau tata kelola, meskipun kontemporer, memiliki cakupan jejaring yang terlalu luas untuk menganalisis sebuah kasus kegagalan kebijakan yang spesifik. Oleh karena itu, paradigma kelima menjadi landasan metodologis yang paling presisi untuk menjangkau akar persoalan dalam riset ini.

1.5.4 Kebijakan Publik

Definisi kebijakan publik memiliki beragam perspektif dalam literatur ilmu politik. Jenkins (1978) memandangnya sebagai serangkaian keputusan strategis aktor politik dalam mencapai tujuan, sedangkan Dye (1972) menyederhanakannya sebagai pilihan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak. Pandangan terakhir ini dikritisi oleh Winarno (2016) karena belum mencakup kesenjangan antara rencana dan realitas pelaksanaan. Kebijakan publik sejatinya adalah sebuah proses dinamis yang lebih dari sekadar usulan di atas kertas. Ripley dan Franklin (1985) memetakan proses ini sebagai siklus berkelanjutan yang meliputi penyusunan agenda, formulasi, implementasi, hingga evaluasi. Hasil evaluasi

tersebut kemudian menjadi umpan balik krusial yang menentukan apakah sebuah kebijakan akan dilanjutkan, dimodifikasi, atau dihentikan.



Gambar 1. 3 Bagan Proses Kebijakan
Sumber: jurnalfuf.uinsa.ac.id

1.5.4.1 Agenda Setting

Agenda setting didefinisikan sebagai proses strategis yang melibatkan persepsi, definisi, dan mobilisasi dukungan agar suatu masalah masuk ke dalam prioritas pemerintah untuk ditindaklanjuti (Ripley & Franklin, 1985). Winarno (2016) memperluas perspektif ini dengan menekankan bahwa penetapan agenda kebijakan kini tidak hanya ditentukan oleh aktor domestik, melainkan juga dipengaruhi oleh dinamika global yang kompleks. Sebagai tahap awal identifikasi isu, agenda kebijakan sering kali terbentuk dari interaksi antara kebutuhan nasional dan tekanan eksternal, seperti desakan organisasi internasional maupun perjanjian multilateral..

1.5.4.2 Formulasi Kebijakan

Tahap perumusan kebijakan, yang dikenal sebagai fase rekomendasi, berfokus pada pengembangan berbagai alternatif solusi bagi masalah yang telah masuk dalam agenda (Lasswell, 2005). Proses ini melibatkan kolaborasi aktif antara ahli,

birokrat, dan kelompok kepentingan untuk menganalisis serta menyeleksi opsi yang paling layak dan efektif dalam mengatasi kompleksitas persoalan publik.

1.5.4.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan manifestasi *output* sistem politik yang mentransformasikan keputusan menjadi tindakan nyata (David, 2019). Proses eksekusi di lapangan ini menuntut mobilisasi sumber daya, pembentukan unit pelaksana, serta interaksi langsung dengan publik. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kejelasan substansi kebijakan dan dukungan sumber daya yang memadai..

1.5.4.4 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan didefinisikan sebagai tahap penilaian dampak dan efektivitas program yang telah berjalan (Jones, 2010). Proses ini bertujuan mengukur ketercapaian tujuan sekaligus mendeteksi efek samping yang tidak diinginkan, sehingga hasilnya menjadi umpan balik strategis bagi siklus kebijakan masa depan. Meskipun evaluasi merupakan tahap akhir, penelitian mengenai kebijakan Penyesuaian Ketentuan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg di Sub-Penyalur ini secara spesifik membatasi fokus analisisnya pada tahapan *agenda setting*.

1.5.5 Multiple Streams Framework (MSF)

Kompleksitas dinamika perubahan kebijakan distribusi LPG 3 kg membuktikan ketidakmampuan pendekatan rasional-linear dalam menjelaskan fenomena yang ada. Proses kebijakan, terutama dalam situasi krisis, tidak berjalan melalui tahapan yang teratur, melainkan menyerupai sistem yang cair, ambigu, dan anarkis di mana berbagai aktor bergerak secara independen. Momentum perubahan baru terjadi

ketika aliran-aliran terpisah tersebut bertemu pada satu titik kritis. Oleh karena itu, penelitian ini mengadopsi *Multiple Streams Framework* (MSF) sebagai pisau analisis utama untuk membedah fenomena tersebut secara mendalam (Kingdon, 1984).

1.5.5.1 Definisi, Asumsi, dan Relevansi

Kompleksitas dinamika perubahan kebijakan distribusi LPG 3 kg membuktikan ketidakmampuan pendekatan rasional-linear dalam menjelaskan fenomena yang ada. Proses kebijakan, terutama dalam situasi krisis, tidak berjalan melalui tahapan yang teratur, melainkan menyerupai sistem yang cair, ambigu, dan anarkis di mana berbagai aktor bergerak secara independen. Momentum perubahan baru terjadi ketika aliran-aliran terpisah tersebut bertemu pada satu titik kritis. Oleh karena itu, penelitian ini mengadopsi *Multiple Streams Framework* (MSF) sebagai pisau analisis utama untuk membedah fenomena tersebut secara mendalam (Kingdon, 1984).

1.5.5.1 Definisi, Asumsi, dan Relevansi

Multiple Streams Framework (MSF) yang digagas Kingdon (1984) menawarkan perspektif bahwa kebijakan publik bukan hasil siklus linear, melainkan konvergensi dari tiga aliran independen: masalah (*problems*), kebijakan (*policies*), dan politik (*politics*). Zahariadis (2007) mempertegas bahwa pertemuan ketiga elemen ini pada waktu yang tepat akan menciptakan "jendela kebijakan" (*policy window*), sebuah momentum krusial yang memungkinkan solusi diadopsi oleh pembuat kebijakan. Pandangan ini didukung oleh Arafat (2023) yang menekankan relevansi MSF

dalam membedah proses kebijakan yang sering kali bersifat irasional dan non-linear, berbeda dengan pendekatan siklus konvensional.

Relevansi MSF semakin menguat di era digital, khususnya dalam membedakan antara "kondisi" (situasi yang diterima wajar) dengan "masalah" (situasi yang menuntut perubahan). Kingdon (1984) mencatat bahwa transformasi dari kondisi menjadi masalah biasanya memakan waktu lama, namun media sosial kini bertindak sebagai akselerator dramatis bagi proses tersebut. Dalam kasus distribusi LPG, antrean fisik yang semula hanya dianggap sebagai kondisi teknis berubah menjadi krisis nasional yang mendesak hanya dalam hitungan jam berkat viralitas di platform X. Fenomena ini membuktikan bahwa media sosial tidak sekadar merefleksikan realitas, tetapi secara aktif membentuk kecepatan dan intensitas aliran dalam ekosistem kebijakan. .

1.5.5.2 Anatomi Proses Kebijakan

Menjawab pertanyaan mengenai siapa saja aktor yang terlibat (*who*) dan bagaimana prosesnya berjalan (*how*), MSF menyediakan struktur untuk memetakan secara sistematis elemen-elemen empiris dari studi kasus kebijakan distribusi LPG 3 kg ke dalam tiga aliran yang berbeda yaitu:

1.5.5.2.1 Aliran Masalah (Problem Stream)

Aliran masalah adalah tentang bagaimana suatu kondisi sosial berhasil mendapatkan perhatian dan didefinisikan sebagai masalah publik yang mendesak untuk ditangani oleh pemerintah. Menurut Kingdon (1984), proses ini umumnya terjadi melalui tiga mekanisme utama: indikator, peristiwa pemfokus (*focusing events*), dan umpan balik (*feedback*).

1.5.5.2.2 Aliran Kebijakan (Policy Stream)

Aliran kebijakan digambarkan oleh Kingdon (1984) sebagai sebuah "*sup purba kebijakan*" (policy primeval soup), sebuah metafora untuk menggambarkan lingkungan di mana berbagai ide, proposal, dan alternatif solusi kebijakan terus-menerus dikembangkan, diperdebatkan, dan "dilunakkan" (softened up) oleh komunitas yang terdiri dari para ahli, akademisi, birokrat, analis kebijakan, dan kelompok kepentingan. Sebuah solusi kebijakan dianggap "matang" jika ia memenuhi kriteria kelayakan teknis, dapat diterima oleh nilai-nilai publik, dan sesuai dengan batasan sumber daya yang ada.

1.5.5.2.3 Aliran Politik (Political Stream)

Aliran politik mencakup dinamika non-teknis seperti suasana hati nasional (*national mood*) dan pergeseran kekuatan kepentingan yang menentukan momentum sebuah isu dalam agenda pemerintah (Kingdon, 1984). Dalam konteks penelitian ini, suasana hati nasional didominasi oleh sentimen publik negatif yang terkonsolidasi di media sosial. Jutaan netizen bertransformasi menjadi aktor politik krusial yang menciptakan tekanan dari bawah (*bottom-up*), di mana akumulasi kemarahan dan ketidakpercayaan publik menjadi kekuatan masif yang mustahil diabaikan oleh pembuat kebijakan.

Tabel 1. 2 Identifikasi Aktor dan Elemen dalam Tiga Aliran MSF

Ahli	Definisi	Aktor-Elemen Empiris yang terlibat
John W. Kingdon (1984) a. Aliran masalah	“Sebuah model yang menjelaskan bagaimana kebijakan dirumuskan dan diadopsi dalam lingkungan politik dengan menggabungkan tiga aliran yang berbeda: masalah (problems), kebijakan (policies), dan	1. Korban jiwa (Yonih, 62), warga pengantre, netizen di platform x. 2. Kementerian ESDM, Dirjen Migas,

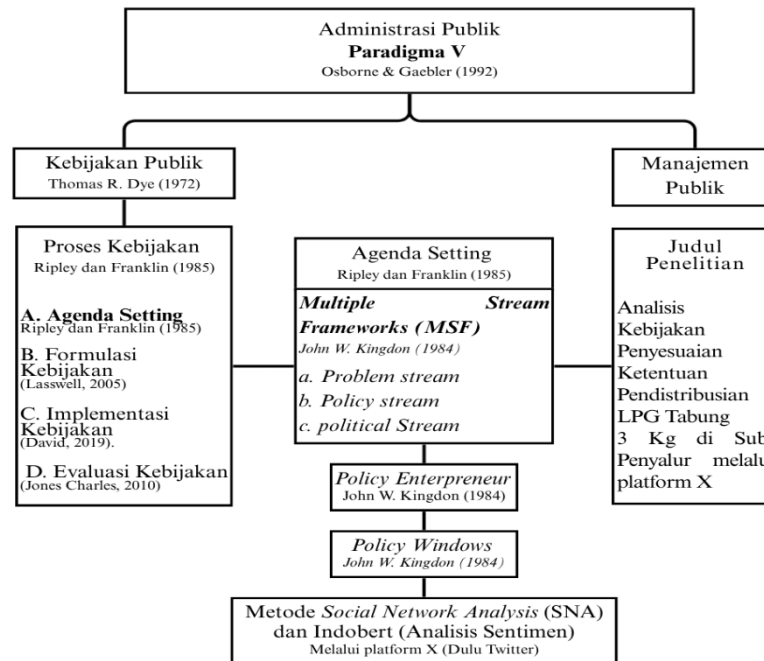
Ahli	Definisi	Aktor-Elemen Empiris yang terlibat
b. Aliran Kebijakan c. Aliran Politik	politik (politics). Ketika ketiga aliran ini harus bertemu pada saat yang sama, menciptakan sebuah 'jendela kebijakan' (policy window) di mana peluang untuk bertindak muncul"	Pemerintah (sebagai entitas. 3. Surat Edaran Dirjen Migas (solusi awal yang gagal), kebijakan pembatalan/pengaktifan kembali pengecer (solusi reaktif yang dipilih).
Nikolaos Zahariadis (2007) a. Aliran Masalah b. Aliran Kebijakan c. Aliran Politik	"Kebijakan diciptakan ketika tiga aliran yang terpisah dan independent masalah, kebijakan, dan politik bertemu untuk menciptakan sebuah jendela kebijakan (policy window)"	4. Eksekutif (presiden dan kementerian) 5. Sentimen publik negatif yang masif, intervensi langsung Presiden, pernyataan resmi pemerintah yang berubah.
Arafat (2023) a. Aliran Masalah b. Aliran Kebijakan c. Aliran Politik	"Kerangka ini menjelaskan bahwa kebijakan publik tidak selalu lahir dari proses yang linear dan rasional, melainkan merupakan hasil dari pertemuan tiga aliran utama. (problem stream, policy stream, dan politics stream)".	

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025)

1.5.5.2.4 Policy Windows

Fenomena konvergensi ketiga aliran memuncak pada periode 29 Januari hingga 4 Februari 2025, menciptakan apa yang disebut Kingdon (1984) sebagai jendela kebijakan (*policy window*). Peluang emas ini terbentuk ketika krisis kemanusiaan akibat kelangkaan (aliran masalah) bertemu dengan tekanan publik digital yang masif (aliran politik), serta tersedianya solusi pragmatis berupa pembatalan aturan (aliran kebijakan). Dalam momentum kritis ini, peran wirausahawan kebijakan (*policy entrepreneurs*) menjadi sangat sentral. Bertindak sebagai pialang strategis, mereka menginvestasikan sumber daya untuk melakukan "penyambungan" (*coupling*) antara masalah mendesak dan solusi yang tersedia di tengah iklim politik yang mendukung.

1.5.5 KerangkaTeori



Gambar 1. 4 Kerangka Teori

1.6 Operasionalisasi Konsep

Konsep berfungsi sebagai fondasi intelektual yang mengabstraksikan fenomena spesifik menjadi ide umum. Kejelasan konseptual menjadi imperatif metodologis agar penelitian memiliki fokus yang tajam dan validitas yang terjaga (Putra, 2022). Mengingat sifat konsep yang seringkali abstrak, diperlukan proses operasionalisasi untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan data empiris. Iba dan Wardhana (2023) serta Hidayah (2022) menjelaskan operasionalisasi sebagai prosedur sistematis untuk merinci konsep menjadi dimensi dan indikator yang terukur secara objektif. Indikator-indikator inilah yang kemudian menjadi landasan penyusunan instrumen penelitian. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini mendefinisikan konsep-konsep kunci sebagai berikut:

- A. Proses Agenda Setting: Upaya mobilisasi dukungan agar suatu masalah masuk ke dalam prioritas pemerintah untuk ditindaklanjuti secara serius.
- B. Multiple Streams Framework (MSF): Model analisis di mana kebijakan tercipta dari konvergensi tiga aliran independen (masalah, kebijakan, dan politik).
- C. Problem Stream (Aliran Masalah): Transformasi kondisi sosial yang semula dianggap wajar menjadi masalah publik mendesak yang menuntut intervensi pemerintah.
- D. Policy Stream (Aliran Kebijakan): Ketersediaan alternatif solusi yang layak (*viable*) dan siap untuk diadopsi.
- E. Political Stream (Aliran Politik): Faktor non-teknis yang memengaruhi agenda, mencakup Sentimen masyarakat terhadap sebuah isu (*national mood*) dan dinamika kelompok kepentingan politik.
- F. Policy Entrepreneur: Aktor atau kelompok yang secara strategis memanfaatkan momentum untuk menyatukan ketiga aliran tersebut.
- G. Policy Window: Jendela peluang yang muncul singkat ketika seluruh aliran bertemu, memungkinkan terjadinya perubahan kebijakan yang signifikan.

1.7 Argumen Penelitian

Kebijakan pembatasan distribusi LPG 3 kg memicu resistensi sosial yang signifikan, terutama dari masyarakat berpendapatan rendah yang kini beralih menyuarakan protes melalui platform media sosial X. Fenomena ini menandai transformasi partisipasi publik dari ruang birokrasi tertutup menuju arena digital yang cair dan *real-time*. Dalam konteks ini, *Multiple Streams Framework* (MSF) menjadi pisau analisis yang relevan untuk memetakan bagaimana fragmentasi arus

masalah, kebijakan, dan politik berinteraksi dalam menciptakan momentum perubahan (Kingdon, 1984).

Media sosial menyediakan data sentimen yang dapat diklasifikasikan secara sistematis ke dalam tiga aliran MSF. Ekspresi kekecewaan publik atas ketidakadilan distribusi merepresentasikan *problem stream*, sedangkan usulan teknokratis seperti penggunaan NIK mencerminkan *policy stream*. Di sisi lain, respons reaktif dari aktor negara di ruang digital menandai hadirnya *politics stream*. Analisis ini menempatkan opini di media sosial bukan sekadar sebagai luapan emosi, melainkan artefak diskursif yang mampu membuka "jendela kebijakan" (*policy window*) dan mendesak evaluasi regulasi (Zahariadis, 2007).

Penelitian ini memosisikan interaksi digital sebagai komponen integral dalam arsitektur kebijakan publik. Pendekatan tersebut mencerminkan orientasi administrasi publik kontemporer, di mana kebijakan tidak lagi dipandang semata sebagai produk tunggal negara, melainkan hasil dialektika kompleks antara pemerintah, masyarakat, dan ruang digital yang menjembatannya.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peran krusial dalam memastikan proses pengumpulan dan analisis data berjalan sistematis. Sugiyono (2018) mendefinisikan metode sebagai pendekatan ilmiah untuk memperoleh data dengan validitas dan tujuan yang jelas. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk memahami realitas objek secara alamiah, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci. Berbeda dengan eksperimen, metode ini menitikberatkan pada

penggalian makna yang mendalam dari fenomena yang dikaji melalui deskripsi data yang komprehensif.

1.8.1 Tipe Penelitian: Desain Jaringan-Tekstual Metode Campuran (MMSNA)

Penelitian ini menerapkan desain *Mixed Methods Social Network Analysis* (MMSNA) yang secara sistematis mengintegrasikan analisis jaringan struktural dengan data atribut kualitatif (Domínguez & Hollstein, 2014). Model spesifik yang digunakan, yakni "BERT-SNA", terdiri dari dua komponen sekuensial. Komponen struktural berfokus memetakan pola relasi dan aktor berpengaruh, sedangkan analisis komputasional menggunakan IndoBERT membedah substansi percakapan untuk menentukan polaritas opini (Koto et al., 2020). Kekuatan utama desain ini terletak pada kemampuan mengintegrasikan hasil sentimen sebagai atribut ke dalam model jaringan, sehingga visualisasi emosi publik baik yang netral maupun kemarahan dapat terpetakan secara jelas bersamaan dengan struktur aktornya.

1.8.2 Situs Penelitian

Platform media sosial X (sebelumnya Twitter) ditetapkan sebagai situs penelitian karena karakteristiknya yang unik dalam memenuhi prasyarat metodologis digital. Platform ini menyediakan dua aliran data simultan yang krusial: data relasional (interaksi *mention*, *reply*, *retweet*) sebagai basis analisis jaringan (SNA), dan data tekstual (isi cuitan) sebagai bahan baku analisis sentimen IndoBERT. Pengumpulan data difokuskan secara spesifik pada periode krisis kebijakan, yakni 29 Januari hingga 4 Februari 2025, dengan menggunakan filter kata kunci relevan seperti "LPG", "Elpiji", dan "Gas Melon".

1.8.3 Subjek dan Unit Analisis Penelitian

Subjek penelitian mencakup seluruh akun pengguna X yang berpartisipasi aktif dalam diskursus sesuai parameter kata kunci dan rentang waktu yang ditetapkan. Secara metodologis, penelitian ini membedakan dua unit analisis yang terintegrasi. Unit analisis jaringan (*SNA*) terdiri dari simpul (*node*) sebagai representasi akun dan sisi (*edge*) sebagai bentuk interaksi relasional (Wasserman & Faust, 1994). Sementara itu, unit analisis tekstual menempatkan setiap cuitan sebagai dokumen individual untuk diproses menggunakan model IndoBERT. Alur analisis bergerak secara sekuensial dari level tekstual (sentimen per cuitan) yang diagregasi ke tingkat pengguna, untuk kemudian dilekatkan kembali sebagai atribut dalam struktur jaringan guna memudahkan interpretasi data.

Tabel 1. 3 Tabel Fenomena

Dimensi	Fenomena	Gejala	Sub-Gejala	Panduan Interview	Informan
Kebijakan Penyesuaian Ketentuan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg di Sub-Penyalar Tinjauan Agenda Setting dengan pendekatan <i>Multiple stream Frameworks (MSF)</i>	<i>Problem Stream</i>	Narasi dari fenomena di masyarakat	Narasi kelangkaan analisis cuitan atau berita yang mengungkapkan kelangkaan elpiji 3 kg.	Visualisasi isu utama Frekuensi menggunakan kata kunci; “LPG”; “LPG 3KG”; “Elpiji”; “Gas 3 KG”; “Gas Melon”. Pada rentang 29 Januari s/d 4 Februari	Cuitan dari pengguna <i>platform X</i>
		Kejadian yang menjadi pusat perhatian (<i>focusing events</i>) dan;	Identifikasi keluhan melalui akun Twitter atau kelompok masyarakat yang aktif		

Dimensi	Fenomena	Gejala	Sub-Gejala	Panduan Interview	Informan
			menyuarakan keluhan.		
		umpan balik (<i>feedback</i>).	Sentimen netizen terhadap kebijakan.		
	<i>Political Stream</i>	Wacana besar antara pro dan kontra	Identifikasi aktor aliansi dan oposisi wacana yang mendukung atau menolak kebijakan pelarangan pengecer LPG.	Mencari dengan kata kunci “LPG”; “LPG 3KG”; “Elpiji”; “Gas 3 KG”; “Gas Melon”. Pada Pada rentang 29 Januari s/d 4 Februari	Peran elite politik, tokoh masyarakat, dan individu atau Lembaga yang memiliki kekuatan politik (parpol) di <i>platform X</i>
		Pergeseran kekuatan politik yang terorganisir (partai politik, kelompok kepentingan) dan;	Pola keterhubungan aktor Siapa yang paling banyak disebut, <i>di-mention</i> , atau dikutip		
		Dinamika pemerintahan	Mobilisasi dan tekanan publik analisis aksi kolektif warganet yang bisa mempengaruhi pembuat kebijakan (misalnya petisi, tagar viral)		

Dimensi	Fenomena	Gejala	Sub-Gejala	Panduan Interview	Informan
	<i>Policy Stream</i>	Solusi Awal;	Aktor pembawa ide solusi siapa yang membawa narasi solusi dan seberapa luas jaringannya.	Mencari dengan kata kunci “LPG”; “LPG 3KG”; “Elpiji”; “Gas 3 KG”; “Gas Melon”. Pada Pada rentang 29 Januari s/d 4 Februari	Para ahli, akademisi, birokrat, analis kebijakan, dan kelompok kepentingan di <i>platform X</i> .
		Teknokratik Kebijakan dan;	Penerimaan wacana kebijakan bagaimana publik menanggapi usulan pemerintah dan elite.		
		Solusi alternatif reaktif.	Pertarungan ide perbandingan narasi kebijakan antara pemerintah dan warganet/ oposisi.		
	<i>Policy Entrepreneur</i>	Aktor atau Lembaga yang mendominasi dan memiliki pengaruh besar terhadap perubahan kebijakan.	Identifikasi aktor, Tindakan Strategis dan; Peran Pendukung.	Mencari dengan kata kunci “LPG”; “LPG 3KG”; “Elpiji”; “Gas 3 KG”; “Gas Melon”. Pada Pada rentan 29 Januari s/d 4 Februari	Pemangku jabatan yang memiliki akses terhadap perubahan kebijakan dalam <i>platform X</i>

Dimensi	Fenomena	Gejala	Sub-Gejala	Panduan Interview	Informan
	<i>Policy Window</i>	Pemicu Indikator	<i>Policy entrepreneurs</i> memanfaatkan peluang,	Mencari dengan kata kunci “LPG”; “LPG 3KG”; “Elpiji”; “Gas 3 KG”; “Gas Melon”. Pada	Keseluruhan rangkaian, problem stream, political stream, policy stream, policy entrepreneur
		Terbukanya Jendela	Lonjakan Percakapan Publik di Media Sosial.	Pada rentan 29 Januari s/d 4 Februari	
		Hasil	Munculnya Aktor Sentral yang Mempengaruhi Diskusi.		

Sumber: Data Diolah oleh Peneliti (2025)

1.8.4 Jenis Data

Data yang digunakan dikategorikan sebagai Data Jejak Digital (Digital Trace Data)

Primer. Data ini primer karena dikumpulkan langsung oleh peneliti, meskipun secara non-intrusif, Data yang dikumpulkan terbagi menjadi tiga jenis utama:

- A. Data Relasional Data numerik yang mendeskripsikan hubungan antar simpul (misal, *edge list*) untuk membangun topologi jaringan;
- B. Data Tekstual (Kualitatif-Mentah): Data teks tidak terstruktur (isi mentah cuitan) yang berfungsi sebagai *input* untuk pipeline IndoBERT.
- C. Data Atribut: Data baru yang dihasilkan *setelah* proses analisis IndoBERT.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini mengacu pada klasifikasi Sugiyono (2015:308), yang membagi data menjadi primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh

langsung dari *platform* media sosial X (Twitter), yaitu hasil *crawling* percakapan publik terkait isu distribusi dan subsidi LPG 3 kg, dengan kata kunci “LPG”, “LPG 3KG”, “Elpiji”, “Gas 3 KG”, dan “Gas Melon” pada periode 29 Januari hingga 4 Februari 2025. Data tersebut diolah dalam format CSV dan dianalisis menggunakan metode *Social Network Analysis* (SNA) melalui perangkat lunak Gephi. Sumber data sekunder berasal dari literatur seperti buku, jurnal ilmiah, laporan kebijakan, dan dokumen lain yang relevan untuk memperkuat landasan teori dan konteks analisis. Kombinasi kedua jenis data ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh dan valid mengenai dinamika opini publik dalam isu kebijakan elpiji bersubsidi.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan digital menggunakan *crawling* data dari *platform* X. Peneliti memanfaatkan bantuan bahasa pemrograman Python karena adanya pembaruan sistem dan *bug fix* yang dilakukan oleh pihak *platform* X, termasuk perubahan struktur API, pembatasan akses data, dan pengetatan sistem autentikasi. Dengan *library* *snsrape* dan *langdetect*, yang dapat digunakan untuk mengakses data publik Twitter berdasarkan kata kunci dan rentang waktu tertentu.

Kata kunci yang digunakan meliputi “LPG”, “LPG 3KG”, “Elpiji”, “Gas 3 KG”, dan “Gas Melon”, dengan rentang waktu dari 29 Januari 2025 hingga 4 Februari 2025. Proses ini menghasilkan file berformat .csv yang memuat data pengguna (*username*), isi cuitan (*tweet*), waktu posting, serta hubungan interaksi seperti *mention*, *reply*, dan *retweet*. Data ini menjadi bahan mentah utama dalam

analisis jejaring sosial. Langkah selanjutnya peneliti melakukan proses penyaringan data (*data cleaning*) untuk menghilangkan *noise* yang memuat konten duplikat, *spam*, atau cuitan yang tidak relevan dengan isu yang diteliti. Kemudian data digunakan dalam aplikasi analisis jaringan Gephi.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Membaca hasil visualisasi dari pengolahan data menggunakan Gephi harus memahami elemen-elemen dasar jaringan sosial yang divisualisasikan dalam bentuk *network graph*. Setiap simpul (*node*) dalam grafik merepresentasikan individu atau akun (dalam konteks ini, pengguna Twitter), sedangkan garis penghubung (*edge*) menggambarkan relasi sosial di antara mereka, seperti *mention*, *retweet*, atau *reply*. Ukuran simpul mencerminkan tingkat keterhubungan atau *degree centrality*, yaitu seberapa sering simpul tersebut terhubung langsung dengan simpul lain dalam jaringan. Semakin besar simpul, semakin tinggi tingkat partisipasi atau pengaruh aktor tersebut dalam percakapan digital yang dianalisis.

Warna pada masing-masing simpul merepresentasikan hasil modularitas pembagian jaringan ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki kepadatan hubungan internal yang tinggi. Warna-warna berbeda menunjukkan adanya kluster opini atau komunitas diskursif yang saling memperkuat narasi tertentu. Untuk memperdalam pemahaman terhadap struktur jaringan, digunakan pula metrik-metrik; *betweenness centrality*, yang menunjukkan sejauh mana simpul menjadi penghubung antar kelompok (aktor yang berperan sebagai perantara informasi) dan; *closeness centrality*, yang mengukur efisiensi simpul dalam menjangkau seluruh jaringan.

Kemudian melakukan Justifikasi Metodologis (IndoBERT) sebuah model bahasa *state-of-the-art* berbasis arsitektur *Transformer* yang dirancang khusus untuk Bahasa Indonesia. Sebagaimana dijelaskan oleh Wilie et al. (2020) dan Koto et al. (2020), IndoBERT merupakan model *pre-trained* yang dilatih menggunakan Indo 4B, sebuah *corpus* Bahasa Indonesia bersih berskala masif (mencakup 4 miliar kata). *Corpus* pelatihan ini mencakup beragam domain, termasuk teks media sosial, blog, dan berita, yang menjadikannya sangat relevan untuk *dataset* penelitian ini. Keunggulan fundamental IndoBERT terletak pada kemampuannya memahami konteks kata secara *bidirectional* (dua arah), memungkinkannya menangkap nuansa makna dengan jauh lebih baik daripada model sebelumnya dan menjadikannya sangat efektif untuk tugas-tugas hilir (*downstream tasks*) seperti analisis sentimen.

1.8.8 Kualitas dan Validitas Data

Kualitas data dalam penelitian ini dijaga melalui beberapa lapisan validasi dan reliabilitas. Pertama, uji validitas isi (*Content Validity*) melalui pemilihan kata kunci yang spesifik dan relevan dengan permasalahan publik “LPG”; “LPG 3KG”; “Elpiji”; “Gas 3 KG”; “Gas Melon”) serta penetapan rentang waktu yang presisi (29 Januari-4 Februari 2025). Hal ini memastikan bahwa data yang dianalisis benar-benar mencerminkan opini publik yang kontekstual dan aktual terkait isu kebijakan yang diteliti. Dan uji reliabilitas teknis (*Technical Reliability*): Reliabilitas dipastikan melalui penggunaan *pipeline* komputasional yang terdokumentasi dengan baik dan dapat direproduksi. Penggunaan model *state-of-the-art* (IndoBERT) yang telah divalidasi dan diterima secara luas oleh komunitas a